

PERILAKU POLITIK JOKO WIDODO SEBAGAI PRESIDEN DALAM 100 HARI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DESSY ALVIRA IRALITA

NIM:11370052

PEMBIMBING:

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan letak kekuasaan yang terpusat di Jawa. Maka tidak heran, pejabat di Indonesia pada umumnya memiliki gaya hidup dan prilaku kepemimpinan yang feodalisme. Seperti para raja jawa yang gemar dilayani, susah ditemui dan jarang terjun langsung ke masyarakat. Prilaku tersebut digambarkan dengan kebiasaan pemerintah yang lebih suka bekerja di belakang meja dan menerima laporan dari bawahannya.

Namun dewasa ini muncul sosok pemimpin Jokowi yang cukup fenomenal, populis dan dekat dengan rakyat. Dari *trackrecord* perjalanan politik Jokowi yang dilalui dengan model kepemimpinan yang *blusukan*. Secara tidak langsung telah mendekatkan Jokowi pada hati masyarakat Indonesia. sehingga kepemimpinan ala Jokowi telah mengantarkan Jokowi pada kursi tertinggi kepemimpinan, yaitu menjadi presiden Ke VII Negara Republik Indonesia.

Latar belakang beliau yang memiliki kebudayaan Jawa *tепа-slira*, menjadi kekuatan tersendiri bagi Jokowi untuk dicintai oleh masyarakat Indonesia. meskipun, dalam perjalanan kepemimpinanya sebagai presiden, Jokowi mengimplementasikan model budaya kepemimpinan *kaula* dan *gusti* yang pada akhirnya menyebabkan kekecewaan masyarakat yang diekspresikan dengan penilaian negative terhadap kepemimpinan Jokowi. Oleh sebab itu dalam karya ilmiah ini, penulis akan menganalisis kebijakan kepemimpinan Jokowi dalam seratus hari masa jabatan jokowi sebagai presiden indonesia ke VII. Adapun yang menjadi pertanyaan yang menjadi adalah bagaimana perilaku politik Joko Widodo dalam membuat kebijakan selama 100 hari menjadi Presiden.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan sosial-politik. Data diperoleh dari buku-buku, kitab, jurnal,undang-undang, dokumentasi, laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis deduktif eksploratif, yaitu bagaimana perilaku politik Joko Widodo dalam membuat kebijakan selama 100 hari menjadi Presiden.

Setelah melakukan kajian terhadap data, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku sosial seorang pemimpin mempengaruhi kebijakan yang diambil. Seperti pada kasus yang dikaji dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden pada saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yaitu kebijakan ketika memilih menteri dalam kabinet kerjanya. Terindikasi ada unsur nepotisme di dalamnya.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Alvira Iralita

NIM : 11370052

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden Dalam 100 Hari

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

22 Rajab 1436 H



Dessy Alvira Iralita
NIM. 11370052

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dassy Alvira Iralita

NIM : 11370052

Judul SKripsi : Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden
Dalam 100 Hari.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2015
22 Rajab 1436 H

Pembimbing

Dr. Subaidi, M.Si
NIP. 19750517 200501 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2028/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERILAKU POLITIK JOKOWIDODO SEBAGAI PRESIDEN DALAM 100 HARI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dassy Alvira Iralita
NIM : 11370052
Telah dimunaqasyahkan pada : 3 Juni 2015
dengan nilai : 95/A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'i ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Pengaji I/Ketua Sidang,

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Pengaji II

Drs.H. Oman Fathurohman SW, MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengaji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 3 Juni 2015



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ه	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)

ت	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ

Ditulis

tayyibatun

رَبْ

Ditulis

rabbun

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طيبة

Ditulis

Tayyibah

مشاهدة

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maṣlahah al-mursalah

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fatḥah dan ḥammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	ḥammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif Contoh: مـ	Ditulis	Ā Mā
2	Fatḥah + ya’ mati (alif layyinah)	Ditulis	Ā

	Contoh: يسعي Kasrah + ya' mati	Ditulis	yas'ā
3	Contoh: ماضي Dammah + wawu' mati	Ditulis	ī Mādī
4	Contoh: وجود Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati Contoh: بينكم	Ditulis	ay baynakum
2	Fatḥah + wawu' mati Contoh: توحيد	Ditulis	aw tawhīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A`antum
أنذرتهم	Ditulis	A`anžartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”, misalnya:

السماء

Ditulis

As-samā'

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود

Ditulis

Wahdat al-wujūd

مرتبة الأحادية

Ditulis

Martabat al-aḥadiyyah

MOTTO

*Tiada hasil yang akan mengkhianati
usaha..*



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

1. Ayah dan Ibuku tersayang dan tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
3. Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman Siyasah angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, sasa, ayu, rini, alimah, wiwin, dian, nia, lia, sara, jessinta, toro, irul, hery, cecep dan kawan-kawanku semua yang tidak bisa saya sebutka satu persatu baik satu jurusan maupun jurusan yang lain, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita haturkan kepada Allah SWT.

Yang telah memberi karunia serta kasih sayangnya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa membawa cahaya Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyusunan karya ini.
5. Ayahanda Surahmat dan Ibunda Endrawaty yang selalu menyemangati dari jauh, terimakasih untuk do'a yang tidak pernah putus selama ini.

6. Bapak Bambang dan Ibu Dewi sebagai orang tua asuh saya di Yogyakarta, terimakasih atas kebaikan yang diberikan selama saya tinggal bersama kalian.
7. Budi Prasetyo dan keluarga, terimakasih atas do'a, semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman di Yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman.
9. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya.*Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 11 Mei 2015

22 Rajab 1436 H

Penyusun

Dessy Alvira Iralita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
MOTTO	x
PERSEMBERAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI DAN KONSEP PERILAKU POLITIK	12
A. Definisi Perilaku Politik.....	12

B. Kerangka Konsep Perilaku Politik	13
BAB III PERILAKU POLITIK JOKO WIDODO DALAM KEPEMIMPINANNYA SELAMA 100 HARI.....	19
A. Kebijakan-Kebijakan Joko Widodo Sebagai Presiden	22
1. Kebijakan Pembentukan Kabinet Kerja Joko Widodo.....	23
2. Kebijakan Menaikan Harga BBM.....	28
3. Kebijakan Penolakan Grasi Bagi Terpidana Narkoba	36
4. Kebijakan Membuat Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia	43
B. Orientasi Kebijakan.....	52
C. Sistem Nilai Yang Menjadi Pijakan Dalam Membuat Kebijakan	54
D. Sistem Budaya Yang Menjadi Pijakan Dalam Membuat Kebijakan	57
1. Pengertian Budaya Politik.....	57
2. Budaya Politik Masyarakat Jawa	59
a. <i>Kaula-Gusti</i>	60
b. <i>Patronnage</i>	60
c. <i>Tepa-Slira</i>	61
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN JOKO WIDODO DALAM PERILAKU POLITIK	69
A. Kebijakan-Kebijakan Joko Widodo	69
B. Orientasi Kebijakan.....	76

C. Sistem Budaya Yang Menjadi Pijakan Joko Widodo Dalam Membuat Kebijakan.....	81
D. Sistem Nilai Yang Menjadi Pijakan Joko Widodo Dalam Membuat Kebijakan	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

Daftar Gambar	Halaman
----------------------	----------------

Gambar 2.1	18
------------------	----

Gambar 4.1	85
------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 3.1	25
-----------------	----

Tabel 4.1	77
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Figur Joko Widodo yang beberapa tahun belakangan ini mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak menjadi Wali Kota Solo dan berhasil me-*launching* mobil produksi lokal yaitu mobil ESEMKA. Joko Widodo juga semakin dikenal banyak kalangan saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012-2014. Setelah itu nama Joko Widodo kian melejit karena saat itu banyak kebijakan yang di buat oleh Joko Widodo yang bersifat populis. Berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukan melalui program “blusukan”. Untuk memeriksa keadaan lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

Pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati sebagai ketua umum partai politik PDI-P akhirnya menunjuk langsung melalui surat mandatnya kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Surat mandat tersebut kemudian disambut baik oleh Jokowi dengan mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.¹

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo, “Akses Pada 9 Maret 2015”

Penyusun mencoba mengkaji tentang perilaku politik Joko Widodo. Di mana perilaku politik itu sendiri adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.²

Joko Widodo merupakan salah satu kandidat calon presiden yang diusung oleh partai politik PDI-P yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dari partai Golkar. Beliau dianggap sebagai sosok yang sangat fenomenal karena melakukan langkah-langkah yang berbeda dengan pemimpin lainnya. Pada umumnya, pejabat di Indonesia sekarang ini terjebak dengan gaya idup feodalisme, minta dilayani, susah ditemui dan jarang terjun langsung ke masyarakat atau lebih suka bekerja di belakang meja dan menerima laporan dari bawahannya. Kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia sangat kontras dengan gaya kepemimpinan tersebut diatas, seperti gaya blusukan, berjalan di gang kumuh, berpenampilan sederhana, tidak banyak retorika, melayani masyarakat, sidak ke instansi dinas dan lain sebagainya.³

Setelah diangkat menjadi Prseiden Indonesia secara aklamasi, dalam 100 hari kpemimpinannya, beliau telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menurut sebagian masyarakat cukup kontroversial. Adapun beberapa kebijakannya yaitu *pertama*, Pembentukan Kabinet Kerja Joko Widodo. *Kedua*,

² Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 20.

³ Sulistyo Seti Utami, “Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Prinsip tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik”, Jurnal Liquidity, Vol. 2, No 2, Juli-Desember 2013, hlm 161

kebijakan menaikan harga BBM. Ketiga, penolakan grasi bagi terpidana narkoba. Keempat, membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti Perilaku Politik Joko Widodo dalam 100 hari menjadi Presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka di rumuskan masalah yang hendak dikaji secara mendalam adalah: “Bagaimana perilaku politik Joko Widodo dalam memberi kebijakan selama 100 hari menjadi Presiden ??”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah di atas tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perilaku politik Joko Widodo dalam 100 hari menjadi presiden.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memberikan wacana ilmiah atau sumbangsih dalam bidang keilmuan agar mengerti bagaimana perilaku politik para elit politik pada dewasa ini.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan acuan dan bahan pembelajaran bagi orang-orang yang berdinamika dalam perilaku politik.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok permasalahan seperti yang penyusun tulis ini. Namun dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan akan bisa memberikan wawasan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang perilaku politik.

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan perilaku politik yang digunakan sebagai perbandingan oleh penyusun, antara lain :

Muhamad Sholeh Marsudi 2009,⁴ “Perilaku Politik Din Syamsudin Dalam Perspektif Khittah Muhammadiyah”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perilaku politik praktis yang dilakukan oleh Din Samsudin adalah merupakan peran individual, yang terkait erat dengan kelembagaan yang dipimpinnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah secara jelas menolak perilaku politik praktis yang dilakukan oleh kadernya yang membawa-bawa nama Muhammadiyah ke dalam politik praktis. *Khittah Muhammadiyah* yang dirumuskan dalam berbagai format sejak tahun 1956-2002 merupakan formulasi dari posisi dan peran Muhammadiyah yang sejak awal

⁴ Muhamad Sholeh Marsudi, “*Perilaku Politik Din Syamsudin Dalam Perspektif Khittah Muhammadiyah*”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

kelahirannya hingga perkembangannya merupakan organisasi yang bergerak dibidang dakwah dan bukan bergerak dalam wilayah politik praktis”.

Rakhman Fuad Sani, 2005,⁵ “Perilaku Politik Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Magelang), Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perilaku politik santri menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik santri di pondok pesantren Raudlatut Thalibin Magelang adalah sikap dan keputusan kiai pondok pesantren. Karena apapun yang menjadi keputusan kiai pondok pesantren tersebut akan selalu diikuti oleh para santrinya, meskipun sebenarnya kiai memberikan kebebasan kepada santri-santrinya. Sedangkan kesadaran politik santri dapat terjadi karena beberapa hal, *Pertama*, tradisi pendiri pesantren yang terbuka, *Kedua*, karena alasan teologis, artinya politik dijadikan sebagai alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. *Ketiga*, karena politik dianggap sebagai kekuatan membangun jaringan dengan kekuasaan”.

Dari telaah pustaka yang sudah penyusun pelajari perbedaanya dengan penelitian saya adalah:

Dengan karya Muhammad Sholeh Marsudi, aktor politik yang digunakan Din Syamsudin dan teori yang digunakan adalah khittah Muhammadiyah. Dengan karya Rakhman Fuad Sani, objek penelitian yang digunakan perilaku politik santri. Sedangkan yang menjadi objek penelitian pada skripsi saya adalah perilaku

⁵ Rakhman Fuad Sani, “*Perilaku Politik Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Magelang)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005)

politik Joko Widodo dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mengefek pada rakyat dan teori yang saya gunakan adalah teori perilaku politik.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab persoalan atau menjawab pokok masalah yang ada di atas, maka di perlukan pemaparan kerangka dan landasan teori untuk mengarah pada satu tujuan yang jelas. Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan pada proposal ini.

Herbert Blumer sebagaimana dikutip oleh Abudin nata menyatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenaik sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, meng interpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.⁶

Teori perilaku politik sebagai aspek dari ilmu politik, mencoba untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh yang menentukan pandangan politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik.

Teori-teori yang yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (*valuational*). Termasuk

⁶ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 184-185

golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.

Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan non-valutional (*value-free*), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan kompratif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori semacam ini mencoba mengaturhubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan, dan dipihak lain dapat membimbingnya ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis.⁷

Dalam hal ini teori perilaku politik khusus membahas tingkah laku politik individu. Karena individu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu, serta apa yang mendorong mereka.⁸

Untuk mempelajari perilaku manusia (*behavior*) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku seseorang saja, tetapi dapat juga

⁷ . Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 44.

⁸ Fatahullah Jurdì, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 63.

mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi, kelompok elite, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik (*polity*).⁹

Teori ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi,tuntutan, harapan dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner. Ia tidak saja mempelajari faktor pribadi tetapi faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis, dan psikologis.¹⁰

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan penelitian yang komperhensif dan integral, maka penyusun menggunakan serangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun skripsi ini adalah jenis penelitian pusstaka (*Library Research*) yang penelitiannya menggunakan buku-buku sebagai sumberdatanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang berusaha untuk mengeambarkan lebih jauh tentang perilaku politik Joko Widodo saat

⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 74.

¹⁰ *Ibid*, hlm 75.

menjabat Presiden dalam 100 hari melakukan analisis kritis dan memberikan pemaparan secara detail mengenai perilaku politik Joko Widodo saat menjabat Presiden dalam 100 hari.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial politik, yaitu cara mendekati masalah dengan cara di teliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku di dasarkan pada pemahaman terhadap undang-undang dan teori yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil sumber datanya dari perilaku politik yaitu :

a. Sumber Primer

Yaitu diperoleh sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu perilaku politik yang dilakukan oleh Joko Widodo.

b. Sumber Sekunder

Yaitu diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari perilaku politik yang dilakukan

oleh Joko Widodo yaitu buku-buku yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian serta wawancara langsung dengan bebagai narasumber dari lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti yang berasal dari situs-situs internet.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang di teliti. Sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh sosial terhadap kebijakan politik.¹¹

Analisis yang digunakan berupa analisis deduktif-induktif, yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penelitian ini, maka penulisannya disusun dalam lima bab sebagai berikut:

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 6.

Di awali dengan bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya adalah bab II, membahas tentang data-data yang telah diperoleh tentang pendekatan perilaku politik. Hal ini sangat penting diuraikan karena agar bisa melihat bagaimana individu atau manusia dalam bermasyarakat terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan yang dibuat.

Sedangkan dalam bab III, memaparkan bagaimana Joko Widodo pada saat membuat kebijakan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 100 hari dilihat dari landasan normatif.

Kemudian dalam bab IV, Analisis terhadap perilaku politik Joko Widodo.

Dan dalam bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seratus hari berlalu, memang tidak begitu objektif untuk meneliti keberhasilan sebuah kepemimpinan. Tetapi perjalanan seratus hari kepemimpinan Presiden Jokowi bukan berarti tidak memiliki kekuarangan dan kelebihan dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia.

Bekerja,bekerja dan bekerja merupakan ungkapan spontanitas Presiden Jokowi pada dewasa ini. Hal itu digambarkan Presiden Jokowi melalui kebijakan-kebijakan politik dan perilaku kepemimpinanya selama seratus hari berjalan. Selama itu Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Bangsa dan Negara Indonesia. meskipun dari beberapa kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Jokowi melahirkan banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam kepemimpinannya sebagai seorang presiden Jokowi telah membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada rakyat. Pertama, saat menaikkan harga BBM bersubsidi yang bertujuan untuk mengalihkan subsidi tersebut kesektor yang lebih produktif. Kedua, Jokowi juga menolak permohonan grasi bagi para terpidana mati kasus narkoba, penolakan oleh Jokowi ini semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba, karena di Indonesia sendiri saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba. Ketiga, membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Seperti kita ketahui laut di Indonesia memiliki potensi yang tinggi dibidang ekonomi, seperti yang kita

ketahui berbagai sumber daya alam yang ada didalamnya dapat kita manfaatkan. Kebijakan ini berguna untuk pemerataan ekonomi Indonesia agar perekonomian Indonesia tidak hanya berpusat di darat saja.

Namun dalam penelitian ini menemukan ada satu kebijakan yang berorientasi pada kekuasaan yaitu pemilihan menteri dimana dalam memilih menteri Joko Widodo mengambil dari orang-orang pernah berjasa padanya saat kampanye pilpres 2014.

Menilai prilaku politik Presiden, tidak terlepas dari budaya politik yang melekat terhadap Presiden Jokowi. Dalam pembahasan karya Ilmiah ini, dijelaskan pengaruh budaya politik terhadap prilaku politik Presiden Jakowi sebagai berikut :

- a) Prilaku politik Presiden Jokowi dipengaruhi oleh Budaya polititik *patroinage*.
Budaya politik seperti ini merupakan sifat naliriah seorang penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya.
- b) Prilaku Politik Jakowi dipengaruhi budaya politik *kaula-gusti*. Budaya politik seperti ini digunakan oleh para pemimpin kerajan Jawa yang melakukan penghambaan terhadap sesuatu yang dinilai memiliki ruang otoritas yang lebih besar dari pada ia.

Pengaruh budaya politik terhadap prilaku Presiden Jokowi dalam memutuskan kebijakan tersebut, telah melahirkan banyak penilaian publik terhadap Presiden Jokowi. salah satu inti dari penilaian publik adalah kebijakan presiden dipengaruhi oleh Partai PDIP sebagai partai pengusung, latar belakang Presiden yang berasal dari Jawa dan kemampuan yang dimiliki presiden Jokowi secara pribadi.

Prilaku politik Presiden Jokowi dipengaruhi oleh nilai Politik *tēpa-slira*. Kondisi ini dialami oleh setiap pemimpin yang merasa bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah yang menjadi bagian dari amanah kepemimpinan. Maka ditengah kondisi seperti ini pemimpin wajib membentuk tim kerja yang fungsinya membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pemimpin tersebut, tetapi pada penelitian yang dikaji , Jokowi memilih seseorang yang pernah berjasa padanya saat kampanye pilpres 2014 untuk dijadikan sebagai kabinet kerja.

B. SARAN

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis merasa banyak kekurangan yang harus di evaluasi oleh para akademisi yang akan meneliti objek yang sama kedepan. Kekurangan yang dialami oleh penulis disebabkan oleh beberapa hal yang tidak dapat dihindari oleh penulis dalam menyelesaikan karya ini. *Pertama* objek penelitian tentang kepemimpinan Presiden Jokowi yang terbilang telalu singkat untuk dinilai sebagai bentuk keberhasilan kepemimpinan, *kedua* tebatasnya biaya,energi dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Keterbatasan ini menyebabkan kurang maksimalnya penulis dalam mengumpulkan data pada saat meneliti guna menemukan kebenaran objektif terhadap kepemimpinan Jokowi. *ketiga* keterbatasan sumber pustaka yang menulis tentang objek yang sedang diteliti dalam karya ilmiah ini.

Oleh sebab itu bagi para akademisi, kedepan penulisan karya ilmiah ini harus dibarengi dengan teknik-teknik pengumpulan data yang lebih maksimal. Hal ini bertujuan untuk memberikan nafas-nafas baru bagi para akademisi untuk tidak

bosan dan lelah dalam membongkar kebenaran objekti yang tersembunyi. Karena menguak kebenaran yang objektif, merupakan amanah yang harus dijalankan oleh setiap insan akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, Semarang, PT Karya Toga Putra Semarang, 2005.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996

Buku Islam

Nawawi, handari. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Buku Umum

Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik* , Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2008.

Almond, A Gabriel. Sidney Verb, alih bahasa, Sahat Simamora, Budaya Politik : *Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Anwar, Saifudin. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.

Atmojo, Sudijono Sastro *Perilaku Politik*, Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Eraswara, Suwardi. *Falsafah kepemimpinan Jawa*, Yogyakarta: Narasi 2013.

Jurdi, Fatahullah. *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika,2002.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosdakarya, 2013.

Purbacaraka, Purnadi. dan Halim, Ridwan A. *Filsafah hukum pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982.

Saptono, *Seribu Pena PKn Jilid 2*, Yogyakarta: Erlangga, 2006.

Setiadi, Elly M & Usman kholip. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sitepu, P. Anthonius. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Surbakti, Ramelan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Varma, SP. *Teori Politik Modern*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Skripsi / Jurnal

Marsud, Sholeh Muhamad. *Perilaku Politik Din Syamsudin Dalam Perspektif Khittah Muhammadiyah*”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Shani, Rakhman. *Perilaku Politik Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Magelang)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Utami, Sulistyo Seti. *Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Prisip tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik*, Jurnal Liquidity, Vol. 2, No 2, Juli-Desember 2013.

Buletin

Ade, T Surya, *Optimalisasi Pembangunan Kemaritiman Nasional*, Info Singkat, Penelitian Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Okttober/2014.

Ardipandanto, Aryojati. *Kabinet Jokowi-JK*, Info Singkat, Penelitian Politik pada bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Okttober/2014.

Rivani, Edmira. *Kebijakan Subsidi BBM Dan Efisiensi Perekonomian*, Info Singkat, Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014

Sita Hidriyah,"*Implikasi Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Hubungan Indonesia-Australia*", Buletin Info Singkat, Penelitian Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 04/II/P3DI/Februari 2015.

Victor, Muhamad Simela. *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*, Info Singkat, Penelitian Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lain-lain

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-NonDegree-17594-1308030045-Chapter1.pdf>,
“Akses Pada 15 April 2015”

<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-bbm-subsidi-adalah#.VS89otyUeCA>, Akses, 16 April 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t546ad8ce988b5/kata-pengamat-soal-kebijakan-kenaikan-harga-bbm>, Akses, 16 April 2015.

http://www.academia.edu/6646215/DAMPAK_KEBIJAKAN_HARGA_BBM_TERHADAP_KEMISKINAN_DI_INDONESIA_Sebuah_Pendekatan_Model_Dinamik, Akses, 20 April 2015.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141026_kabinet_jokowi_pengamat Akses 26 April 2015.

http://www.pkspiyungan.org/2015/01/betapa-munafiknya-politik-balas-budi_10.html, Akses 11 Mei 2015.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141026_kabinet_jokowi_pengamat, Akses 26 April 2015.

Jokowi Yakin Rakyat Akan Rasakan Dampak Positif Kenaikan Harga BBM Beberapa Tahun Lagi”, harian kompas.com, Rabu, 19 November 2014 | 10:41 WIB, akses 25 April 2015.

Keterangan Presiden Jokowi Tentang kebijakaan kenaikan harga BBM, dalam harian Kompas.com Tanggal 17 November 2015, Akses, 16 April 2015.

Keterangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Tentang kebijakaan kenaikan harga BBM, dalam harian Tribunnews.com Tanggal 18 November 2014, Akses, 16 April 2015.

Keterangan Jokowi saat memberikan kuliah umum kuliah umum di Balai Senat Balairung UGM. Acara yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara Dies Natalis UGM ke-6, Tanggal 9 Desember 2014”, <http://www.balairungpress.com/2014/12/jokowi-paparkan-rencana-pengalihan-subsidi/>, Akses Tanggal 21 April 2015.

Keterangan Gubernur Bank Indonesia: Agus Martowardojo, Tentang Dampak kenaikan BBM, Dalam harian Merdeka.com 29 Desember 2014, Akses, 20 April 2014

Keterangan Ketua Umum KASBI Ninig Elitos mengatakan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi semakin memiskinkan kaum pekerja, Dalam Harian Merdeka.com 18 Desember 2014, Akses, 20 April 2014.

Kabinet Kerja Kabinet Jokowi Dibayangi Kepentingan Parpol,
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja, Akses 26 April 2015.

Rokhmin Dahuri: 80 Persen Potensi Maritim Indonesia Belum Terjamah,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/12/rokhmin-dahuri-80-persen-potensi-maritim-indonesiabelum-terjamah>, Akses 26 April 2015.

Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
<http://www.tempo.co/read/news/2014/10/27/078617247/Latar-Belakang-Menteri-Jokowi-dari-Parpol-dan-Profesional/1/0>, Akses 11 Mei 2015.

Berbagi Hak Prerogatif Ala Jokowi,
http://nasional.inilah.com/read/detail/2147649/berbagi-hak-prerogatif-ala-jokowi#.VE2UL_msX5E, Akses Tanggal 26 April 2015.

Lampiran

Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500

Senin, 17 November 2014 | 21:22 WIB



TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai 18 November 2014 pukul 00.00, BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

"Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi pun menjelaskan bahwa anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Adapun, lanjut Jokowi, sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, dia menetapkan harga baru BBM yang akan berlaku pada pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Jokowi kemudian menyebutkan besaran kenaikan harga BBM subsidi yang terdiri dari premium dan solar.

"Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," papar Jokowi.

Ini Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM Saat Harga minyak Dunia Melemah

Selasa, 18 November 2014 02:49 WIB

+ Share



Tribunnews/Dany Permana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri-menteri terkait mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah punya alasan mendasar menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk jenis premium dan solar di tengah harga minyak dunia tengah melemah.

Sebagai dijelaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014) malam, hitung-hitungan harga minyak premium dan solar tidak

bisa berpatokan pada turunnya harga minyak dunia hanya dalam beberapa pekan terakhir ini.

"Kita tidak melihat harga minyak hari per harinya. Kita harus melihatnya dalam setahun, sebulan, bagaimana perkembangannya. karena harga minyak ini kita lihat bahwa pasti akan rendah terus. Bisa saja kemudian naik, meski naiknya sedikit, tetapi tetap saja itu akan menciptakan subsidi," tegas Menkeu.

Dengan mengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, akan banyak infrastruktur, perlindungan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan Pembangunan pembangkit listrik yang bisa dibangun.

"Kalau kita lihat, ya rata-rata setahun ini kalau kita ambil perkiraan premium itu Rp3.500 per liter, subsidiinya per liter kalau kita lihat rata-rata setahunnya. Jadi memang itu jumlahnya cukup besar. Jadi kalau kita naikkan Rp2.000 berarti masih menyisakan kalau kita rata-rata setahun Rp1.500. Kalau memang lihat hari ke hari, bulan ke bulan pasti ada fluktuasi," jelasnya.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan tambahan anggaran untuk belanja produktif pemerintah di atas Rp100 triliun.

"Kebijakan hari ini (menaikkan harga BBM) akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun," ungkap Menkeu.

Presiden Jokowi pastikan tolak semua grasi kasus narkoba

Sabtu, 14 Februari 2015 00:51 WIB | 8.980 Views



Solo (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menolak semua grasi yang diajukan dalam kasus narkoba mempertimbangkan dampak negatif yang merugikan bangsa akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Ada 64 yang sudah diputuskan (hukuman mati), mengajukan grasi, saya pastikan semuanya saya tolak, tidak akan," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura di Solo, Jumat malam.

Jokowi menyatakan tidak gentar meskipun mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak termasuk PBB, NGO, hingga mendapatkan surat amnesti internasional.

Namun menurut dia, Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba.

"Kalau ada pengampunan untuk narkoba dan makin lama dibiarkan hancurlah kita," katanya.

Ia mencatat dalam setiap hari di Indonesia sebanyak 50 orang meninggal karena narkoba sehingga dalam setahun jumlahnya mencapai 18.000 orang meninggal karena narkoba.

Fakta ini, kata dia, menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba.

"Kalau pas (ada) yang ketangkap, tidak ada lagi yang gram, semuanya kilo (gram) atau ton," katanya.

Presiden juga menyayangkan eksekusi mati yang dijatuhan kepada terpidana kasus narkoba sering kali tidak segera dilaksanakan sehingga efek jera tidak segera dirasakan.

"Yang terjadi justru yang di dalam mengatur dan memanage peredaran narkoba," katanya.

Menurut dia, hal itu tidak bisa terus-menerus dibiarkan karena menyangkut moralitas dan mentalitas dimana selain belasan ribu orang meninggal karena narkoba tapi juga jutaan lainnya yang harus direhabilitasi selain ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Dessy Alvira Iralita
Tempat/Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 22 Desember 1993
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Sumpiuh 04/02, Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah.
Nama Ayah	: Surahmat
Nama Ibu	: Endrawaty

Riwayat Pendidikan

Formal : SDN 04 Sumpiuh 1999-2002
: SDN 01 Purwodadi 2002-2005
: SMPN 01 Sumpiuh 2005-2008
: SMAN 01 Sumpiuh 2008-2011
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011